

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan

keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut harus dilaksanakan menurut cara tertentu yang lazim dan berterima umum serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Informasi akuntansi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu pemerintahan daerah yang digunakan oleh para pemakai sesuai dengan kepentingan masing-masing dan perlu adanya Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No1 (2004) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dari laporan laba rugi neraca laporan arus kas laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misal sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan (Muhammad Yusuf dan Soraya 2014: 100)

Menurut PSAK (2004) tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan pemerintah daerah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis kinerja keuangan pada Kantor Badan Pusat Statistik

Sulawesi Utara adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul : *Analisis Laporan Keuangan Dalam Rangka Mengukur Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pusat Statistik periode tahun anggaran 2015 dan 2014.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keandalan laporan keuangan dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan yang baik oleh kantor badan pusat statistik?.
2. Bagaimanakah presentase perbandingan laporan keuangan pada periode tahun anggaran 2014 dan 2015?.

1.4 Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini dikhususkan pada laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2014 dan 2015.
2. Data yang digunakan adalah data intern Badan Pusat Statistik tahun 2014 dan 2015
3. Penelitian ini mengacu pada perbandingan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2014 dan 2015.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah laporan keuangan yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan yang baik oleh badan pusat statistik.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis presentase perbandingan kinerja keuangan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2015 an 2014 pada badan pusat statistik sulawesi utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya
3. Bagi Penulis, untuk dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan analisis sistem laporan keuangan.